



Aksesibilitas Fasilitas Umum Fisik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung

Aulia Ananda Kartika¹, Wirman Syafri², Rizki Amalia³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magister Terapan, Program Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jawa Barat, Indonesia

Email: auliaanandak@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the accessibility of physical public facilities for persons with disabilities in Bandung City. Existing accessibility has not fully met the principles of convenience, usability, safety, and independence, thereby limiting the mobility and social participation of persons with disabilities. The research gap lies in the limited implementation of inclusive accessibility in physical public facilities. This study employs John Black's Accessibility Theory, which consists of four dimensions: convenience, usability, safety, and independence. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through interviews with seven informants, observations, and documentation. The findings indicate that, in terms of convenience, accessibility has not yet become a primary consideration in the development of public facilities. Regarding usability, the government tends to focus more on outputs, namely the availability of facilities, rather than outcomes such as convenience, usability, safety, and independence for persons with disabilities. In terms of safety, public facility safety systems have not been comprehensively integrated. Regarding independence, facility planning remains insufficiently inclusive, as it is still predominantly top-down and not fully based on users' needs.*

Keywords: *accessibility, persons with physical disabilities, persons with sensory disabilities, public physical facilities, local government, Bandung City*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji aksesibilitas fasilitas umum fisik bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. Aksesibilitas yang tersedia masih belum sepenuhnya memenuhi faktor kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian sehingga membatasi mobilitas serta partisipasi sosial penyandang disabilitas. Kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya penerapan aksesibilitas yang inklusif pada fasilitas umum fisik. Penelitian ini menggunakan teori aksesibilitas menurut John Black yang mencakup empat faktor, yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada 7 informan, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor kemudahan aksesibilitas belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan fasilitas publik, faktor kegunaan, pemerintah lebih menitikberatkan pada output berupa tersedianya fasilitas dibandingkan outcome berupa kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian, pada faktor keselamatan, sistem keselamatan fasilitas publik belum terintegrasi secara menyeluruh, faktor kemandirian perencanaan fasilitas yang belum inklusif karena masih bersifat top-down dan belum berbasis kebutuhan pengguna. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas fasilitas umum fisik di Kota Bandung masih perlu ditingkatkan. Diharapkan pemerintah dapat memperkuat penyediaan fasilitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: aksesibilitas, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas sensorik, fasilitas umum fisik, pemerintah daerah, Kota Bandung

1. LATAR BELAKANG

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan kemudahan menjangkau fasilitas umum, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak asasi manusia untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas terhadap fasilitas publik, transportasi, informasi, serta berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasi aksesibilitas fasilitas umum fisik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga kebutuhan terhadap fasilitas publik yang aksesibel semakin mendesak. Di Kota Bandung, jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2024 tercatat sebanyak 8.717 jiwa.

Namun, peningkatan jumlah penyandang disabilitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan fasilitas umum fisik yang inklusif dan mudah diakses.

Berbagai fasilitas publik di Kota Bandung, seperti trotoar, taman kota, halte, dan ruang terbuka publik, telah mengalami pembangunan dan revitalisasi. Akan tetapi, masih ditemukan berbagai hambatan aksesibilitas, seperti guiding block yang terhalang, ramp yang tidak sesuai standar, parkir liar di trotoar, serta fasilitas pendukung yang belum terintegrasi secara optimal bagi penyandang disabilitas.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya mobilitas, kemandirian, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas dalam memanfaatkan ruang publik. Penelitian mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas telah banyak dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian oleh Oni Dawud, Siti W. Mursalin, Endah T. Anomsari, dan Nur I. Taufik (2019) mengenai strategi perwujudan Kota Bandung sebagai kota ramah penyandang disabilitas menemukan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan kota yang inklusif meskipun berbagai strategi telah dirumuskan. Kedua, penelitian Putra Rizkiya, Myna A. Yusuf, dan Irin Caisarina

(2021) menunjukkan bahwa akses transportasi publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh masih rendah karena fasilitas dan desain halte belum ramah disabilitas.

Ketiga, penelitian Jane Kartika Propiona (2021) mengenai implementasi aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta menemukan bahwa implementasi kebijakan belum optimal akibat lemahnya penegakan aturan dan masih banyak fasilitas yang belum ramah disabilitas. Keempat, penelitian Bhakti N. Avianto dan Syifa N. Fauziah (2020) menunjukkan bahwa pelayanan aksesibilitas jalur ramah disabilitas pada trotoar Kota Depok belum efektif karena minimnya perhatian pemerintah dan banyaknya hambatan di lapangan. Kelima, penelitian Rofi'ah I. Pangestu dan Sri Wibawani (2022) lebih berfokus pada strategi pemberdayaan penyandang disabilitas mental dan menemukan bahwa keberhasilan program masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas pendukung.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar penelitian masih berfokus pada transportasi publik, strategi kota ramah disabilitas, implementasi kebijakan, atau pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian yang secara khusus mengkaji aksesibilitas fasilitas umum fisik secara komprehensif berdasarkan dimensi kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Kota Bandung.

Kesenjangan pengetahuan dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara mendalam menganalisis aksesibilitas fasilitas umum fisik bagi penyandang disabilitas menggunakan teori aksesibilitas John Black yang mencakup empat dimensi utama, yaitu kemudahan (convenience), kegunaan (usability), keselamatan (safety), dan kemandirian (independence).

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai aksesibilitas fasilitas umum fisik tidak hanya dari aspek ketersediaan fasilitas, tetapi juga dari aspek kebermanfaatan dan kemampuan fasilitas tersebut dalam mendukung partisipasi penyandang disabilitas secara mandiri.

State of the art penelitian ini terletak pada penggunaan teori aksesibilitas John Black untuk menganalisis aksesibilitas fasilitas umum fisik bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung secara holistik melalui empat dimensi aksesibilitas. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi hambatan aksesibilitas yang lebih mendalam serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada pembangunan fasilitas publik yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aksesibilitas fasilitas umum fisik bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung berdasarkan faktor kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan aksesibilitas guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang inklusif.

2. KAJIAN TEORITIS

Aksesibilitas menurut John Black dalam Endang Sri Wahyuni (2016:3) adalah konsep yang mengacu pada kemampuan seseorang, khususnya penyandang disabilitas, untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas umum atau layanan publik tanpa hambatan. Konsep ini penting karena pelayanan publik harus dapat dinikmati oleh semua orang secara setara tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. John Black menyatakan bahwa aksesibilitas terdiri dari empat indikator utama: kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Kemudahan berarti setiap orang memiliki akses yang lancar dan tidak mengalami halangan untuk memasuki atau menggunakan fasilitas yang ada.

Kegunaan mengandung arti bahwa fasilitas tidak hanya bisa diakses, tetapi juga harus dapat digunakan secara efektif oleh semua pengguna. Keselamatan menegaskan bahwa lingkungan dan fasilitas harus memberikan rasa aman dan meminimalkan risiko bahaya bagi penggunanya. Sedangkan kemandirian menandakan bahwa setiap individu harus mampu menggunakan fasilitas tersebut tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain. Secara keseluruhan, aksesibilitas di sini menuntut terpenuhinya dimensi fisik, fungsional, dan sosial agar penyandang disabilitas bisa berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ketidaktersediaan atau ketidaksesuaian aksesibilitas ini menjadi bentuk diskriminasi yang menghalangi hak-hak mereka sebagai warga negara yang sah, sehingga upaya untuk memperbaiki dan menerapkan pedoman teknis aksesibilitas menjadi sangat krusial dalam memberikan layanan publik yang inklusif dan adil bagi semua pihak. Dengan demikian, pada

penelitian ini penulis menggunakan teori aksesibilitas yang dikemukakan oleh John Black dalam (Endang Sri Wahyuni, 2016:3) yang terdiri dari empat kriteria utama yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Mengacu pada penerapan pedoman teknis, kriteria aksesibilitas John Black dalam (Endang Sri Wahyuni, 2016:3) terdapat 4 faktor aksesibilitas yaitu: kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian.

Kemudahan (Convenience)

Kemudahan dalam konteks aksesibilitas berarti setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, harus memiliki kemampuan untuk mengakses seluruh area publik atau bangunan tanpa ada hambatan fisik maupun non-fisik. Hal ini tidak hanya soal keberadaan fasilitas, tetapi bagaimana fasilitas tersebut dirancang agar bisa digunakan oleh siapa saja tanpa diskriminasi. Contohnya adalah tersedianya jalur masuk yang mudah dijangkau seperti ramp yang menyesuaikan kebutuhan pengguna kursi roda, pintu yang lebar dan tidak berat untuk dioperasikan, serta adanya rambu petunjuk yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pengguna. Kemudahan ini sangat penting untuk menjamin inklusivitas sehingga semua orang bisa mengakses layanan publik dengan setara tanpa merasa terhalang.

Kegunaan (Usability)

Kegunaan mengacu pada kemampuan setiap orang untuk memanfaatkan secara efektif tempat atau bangunan umum yang ada di lingkungannya. Ini berarti fasilitas yang ada tidak hanya bisa dimasuki atau dijangkau, tetapi juga dapat digunakan secara fungsional sesuai dengan tujuan penggunaannya. Misalnya, toilet umum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas dengan mudah dan aman, bukan sekadar tersedia tetapi tidak dapat difungsikan sesuai kebutuhan mereka. Kegunaan ini mencakup kesesuaian desain yang memperhatikan kebutuhan spesifik, sehingga semua orang dapat menjalankan aktivitasnya tanpa kesulitan, termasuk membaca informasi, menggunakan fasilitas tanpa hambatan, dan berinteraksi dengan lingkungan secara mandiri.

Keselamatan (Safety)

Keselamatan merupakan aspek krusial dalam aksesibilitas, yang berarti lingkungan binaan dan bangunan publik harus memberikan jaminan keamanan bagi semua penggunanya. Keselamatan ini meliputi perlindungan dari risiko kecelakaan, cedera, atau bahaya fisik yang mungkin dialami pengguna, terutama penyandang disabilitas yang rentan terhadap bahaya tertentu. Contoh konkret adalah penggunaan material lantai anti-slip pada area yang licin, penerapan desain sudut tumpul untuk mencegah cedera, sistem penerangan memadai untuk menghindari kecelakaan, serta tanda peringatan yang jelas dan bisa diakses oleh semua, termasuk yang memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran. Dengan jaminan keselamatan, pengguna merasa nyaman dan terlindungi saat menggunakan fasilitas publik sehingga mereka dapat beraktivitas dengan tenang dan tanpa kekhawatiran.

Kemandirian (Independence)

Kemandirian berarti setiap orang harus dapat pergi dan menggunakan seluruh tempat umum atau bangunan di lingkungannya tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain. Ini mensyaratkan desain dan penyediaan fasilitas yang memungkinkan individu, termasuk penyandang disabilitas, mengakses dan menggunakan fasilitas secara mandiri. Contohnya adalah adanya jalur khusus yang jelas dan mudah diikuti untuk penyandang tunanetra, fasilitas kursi roda yang dapat digunakan tanpa perlu bantuan orang lain, serta informasi yang dapat diakses secara mandiri baik secara visual maupun auditori. Prinsip ini penting untuk menjaga martabat dan hak asasi manusia, karena kemandirian dalam beraktivitas menumbuhkan rasa percaya diri dan penghargaan diri pada individu tersebut. Secara keseluruhan, keempat kriteria ini saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan, fasilitas, dan pelayanan publik yang inklusif, adil, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak dan kebutuhan seluruh warga, khususnya bagi penyandang disabilitas. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan agar tidak ada pihak yang terpinggirkan dalam menikmati layanan publik dan bisa berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Bandung pada instansi dan pihak yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan melibatkan informan yang memahami permasalahan secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian aksesibilitas fasilitas umum fisik bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung berdasarkan teori aksesibilitas John Black yang meliputi faktor kemudahan (*ease*), kegunaan (*usability*), keselamatan (*safety*), dan kemandirian (*independence*). Analisis dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi terhadap berbagai fasilitas umum di Kota Bandung.

Tabel 1. Hasil Analisis Aksesibilitas Fasilitas Umum Fisik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Faktor	Indikator Temuan	Hasil Penelitian
Kemudahan (<i>Ease</i>)	Ketersediaan akses	Trotoar, ramp, dan guiding block tersedia namun belum merata

Kegunaan (<i>Usability</i>)	Fungsi fasilitas	Fasilitas tersedia tetapi belum seluruhnya berfungsi optimal
Keselamatan (<i>Safety</i>)	Keamanan penggunaan	Masih ditemukan fasilitas yang tidak sesuai standar
Kemandirian (<i>Independence</i>)	Kemampuan mandiri	Pengguna masih membutuhkan bantuan pada beberapa fasilitas

Kemudahan (Ease)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas aksesibilitas seperti trotoar, guiding block, dan ramp telah tersedia pada sejumlah kawasan publik Kota Bandung. Namun penyebaran fasilitas tersebut belum merata sehingga masih terdapat hambatan akses bagi penyandang disabilitas. Menurut John Black, kemudahan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mencapai dan menggunakan fasilitas publik tanpa hambatan yang berarti. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas belum sepenuhnya menjamin kemudahan akses karena masih terdapat ketimpangan penyediaan sarana pada berbagai wilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan aksesibilitas masih memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar seluruh penyandang disabilitas memperoleh hak akses yang setara.

Kegunaan (Usability)

Fasilitas yang tersedia belum seluruhnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penyandang disabilitas. Beberapa guiding block terhalang oleh hambatan fisik seperti tiang, pohon, maupun aktivitas lainnya. Selain itu, beberapa ramp belum memenuhi standar kemiringan yang sesuai. Dalam teori John Black, kegunaan menekankan kemampuan fasilitas untuk digunakan secara efektif sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas saja tidak cukup apabila fungsi dan manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh penyandang disabilitas.

Keselamatan (Safety)

Aspek keselamatan masih menjadi tantangan dalam penyediaan fasilitas publik yang inklusif. Hasil penelitian menunjukkan adanya trotoar yang rusak, jalur pemandu yang terputus, serta fasilitas yang berpotensi membahayakan pengguna. Menurut John Black, keselamatan merupakan unsur utama dalam aksesibilitas karena menentukan kemampuan seseorang untuk bergerak secara aman dan nyaman. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan pemeliharaan dan pengawasan fasilitas publik agar kualitas aksesibilitas tetap terjaga.

Kemandirian (Independence)

Sebagian penyandang disabilitas masih membutuhkan bantuan orang lain ketika mengakses fasilitas tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama aksesibilitas untuk menciptakan kemandirian belum sepenuhnya tercapai. Menurut John Black, aksesibilitas yang

baik harus mampu mengurangi ketergantungan pengguna terhadap bantuan pihak lain. Oleh karena itu, peningkatan kualitas fasilitas dan lingkungan yang inklusif menjadi faktor penting dalam mendukung kemandirian penyandang disabilitas.

Tabel 2. Kondisi Aksesibilitas pada Beberapa Fasilitas Umum di Kota Bandung

Jenis Fasilitas	Kondisi Eksisting	Permasalahan
Trotoar	Tersedia di jalan utama	Tidak semua dilengkapi guiding block
Guiding Block	Tersedia pada kawasan tertentu	Terhalang tiang, pohon, PKL
Ramp	Tersedia pada beberapa gedung	Kemiringan belum sesuai standar
Gedung Pelayanan Publik	Sebagian aksesibel	Belum seluruhnya lengkap

Tabel 3. Hasil Penelitian Berdasarkan Teori John Black

Faktor	Temuan	Interpretasi
<i>Ease</i>	Fasilitas tersedia namun belum merata	Belum dinikmati secara setara
<i>Usability</i>	Fasilitas belum optimal	Ada kesenjangan fungsi dan ketersediaan
<i>Safety</i>	Masih ada risiko bagi pengguna	Standar keselamatan belum maksimal
<i>Independence</i>	Masih membutuhkan bantuan	Kemandirian belum optimal

Berdasarkan hasil penelitian, aksesibilitas fasilitas umum fisik bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung masih terbatas. Masih diperlukan perbaikan pada aspek pemerataan fasilitas, keberfungsian fasilitas, keselamatan pengguna, dan kemandirian penyandang disabilitas. Upaya peningkatan aksesibilitas harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembangunan yang inklusif, pengawasan standar aksesibilitas, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, aksesibilitas fasilitas umum fisik bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung masih terbatas. Hambatan masih ditemukan pada aspek kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian, sehingga aksesibilitas yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung kesetaraan akses dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui penyediaan fasilitas aksesibilitas di

Aksesibilitas Fasilitas Umum Fisik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung ruang publik.

Ke depan, diperlukan peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas, penguatan pengawasan terhadap standar aksesibilitas, serta perencanaan yang lebih melibatkan penyandang disabilitas sebagai pengguna utama. Dengan demikian, aksesibilitas tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban pembangunan, tetapi juga mampu mewujudkan Kota Bandung yang lebih inklusif, aman, dan ramah bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Avianto, B. N., & Fauziah, S. N. (2020). Pelayanan aksesibilitas jalur ramah disabilitas di trotoar Jalan Margonda Kota Depok. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9), 788–801.
- Dawud, J., Mursalim, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi perwujudan Kota Bandung sebagai kota ramah penyandang disabilitas: Sebuah perspektif aksesibilitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141–159.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Maftuhin. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator. *Tataloka*, 19(2), 93–103.
- Murtie, A. (2017). *Ensiklopedia Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Javalitera.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131–150.
- Nurjaman, R. H. (2022). Pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01).
- Pangestu, R. A. I., & Wibawani, S. (2022). Strategi pemberdayaan program Karepe Dimesemi Bojo pada penyandang disabilitas mental. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 229–237.
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232.
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.
- Putri, B. F., Azijah, D. N., & Gumilar, G. G. (2024). Aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas di

Rizkiya, P., Yusuf, M. A., & Caesarina, I. (2021). Akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi publik di Kota Banda Aceh. *Arsitekno*, 8(1), 37–44.

Tarsidi, D. (2011). Kendala umum yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik. *Jassi Anakku*, 11(2).

Warsilah, H. (2017). *Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial di Kota Solo, Jawa Tengah*.

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi.

Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20(2), 127–142.

Yulaswati, V., dkk. (2021). *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2024). Diakses dari <https://bpskotabandung.go.id>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. (2024). Diakses dari <https://opendata.bandung.go.id>